

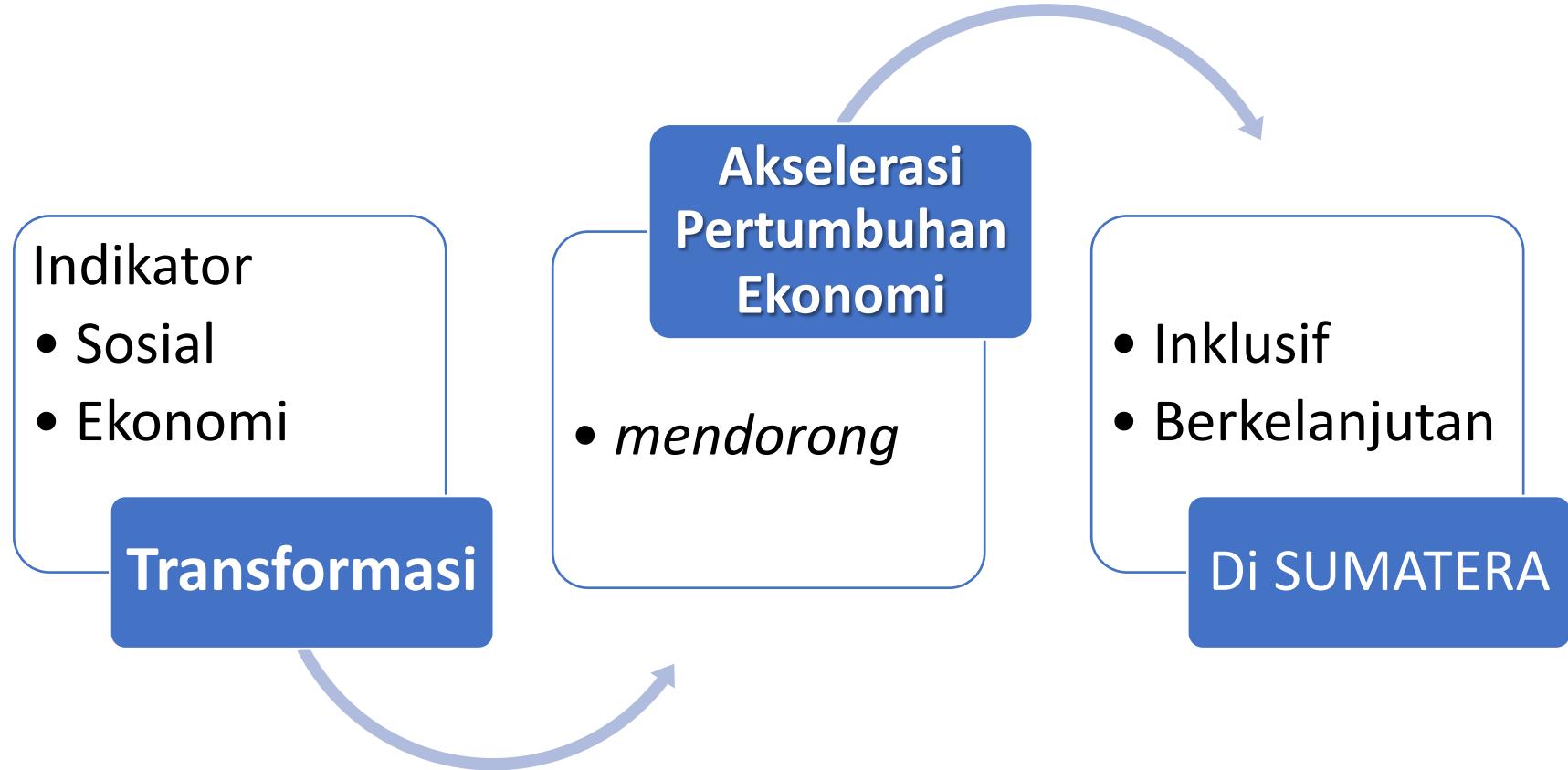


# Penguatan TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI WILAYAH SUMATERA

**Menuju Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Disiapkan dan disampaikan oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan pada Forum Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto – Indikator Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) Se-Sumatera Tahun 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 di Jambi.

# FOKUS KONSULTASI REGIONAL



## *How to transform?*



# The World is Changing

*Half of the copybook wisdom of our statesmen is based on assumption which were at one time true, or partly true, but are now less and less true by the day.*

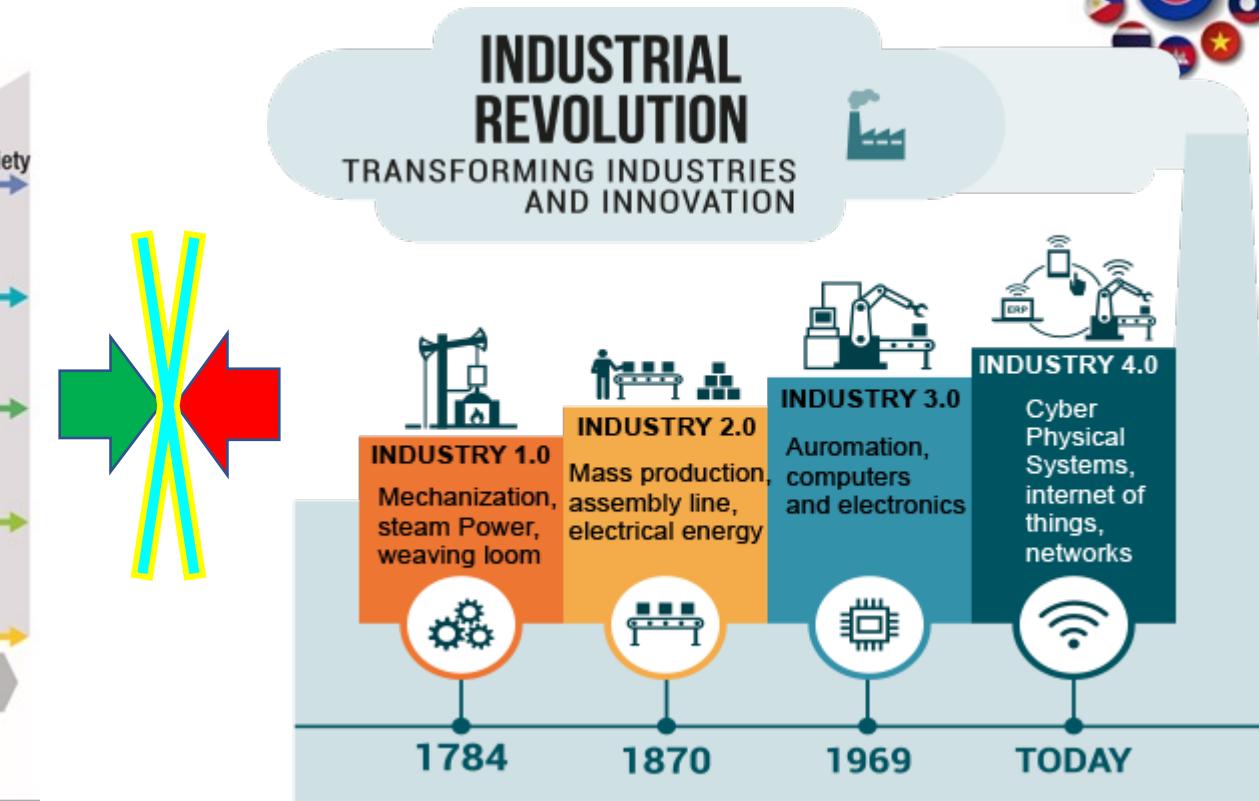
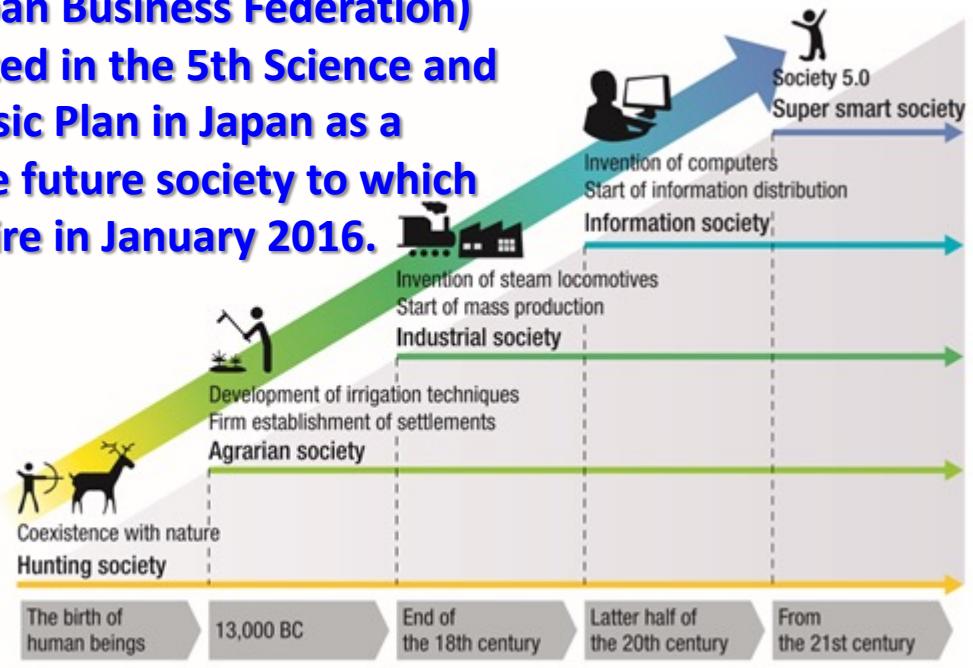
*We have to invent new wisdom for a new age.*

**John Maynard Keynes**

# TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI



**“Society 5.0” is the concept that Japan proposed. It was initially proposed by <sup>Society 5.0</sup> Keidanren (Japan Business Federation) and incorporated in the 5th Science and Technology Basic Plan in Japan as a concept for the future society to which we should aspire in January 2016.**

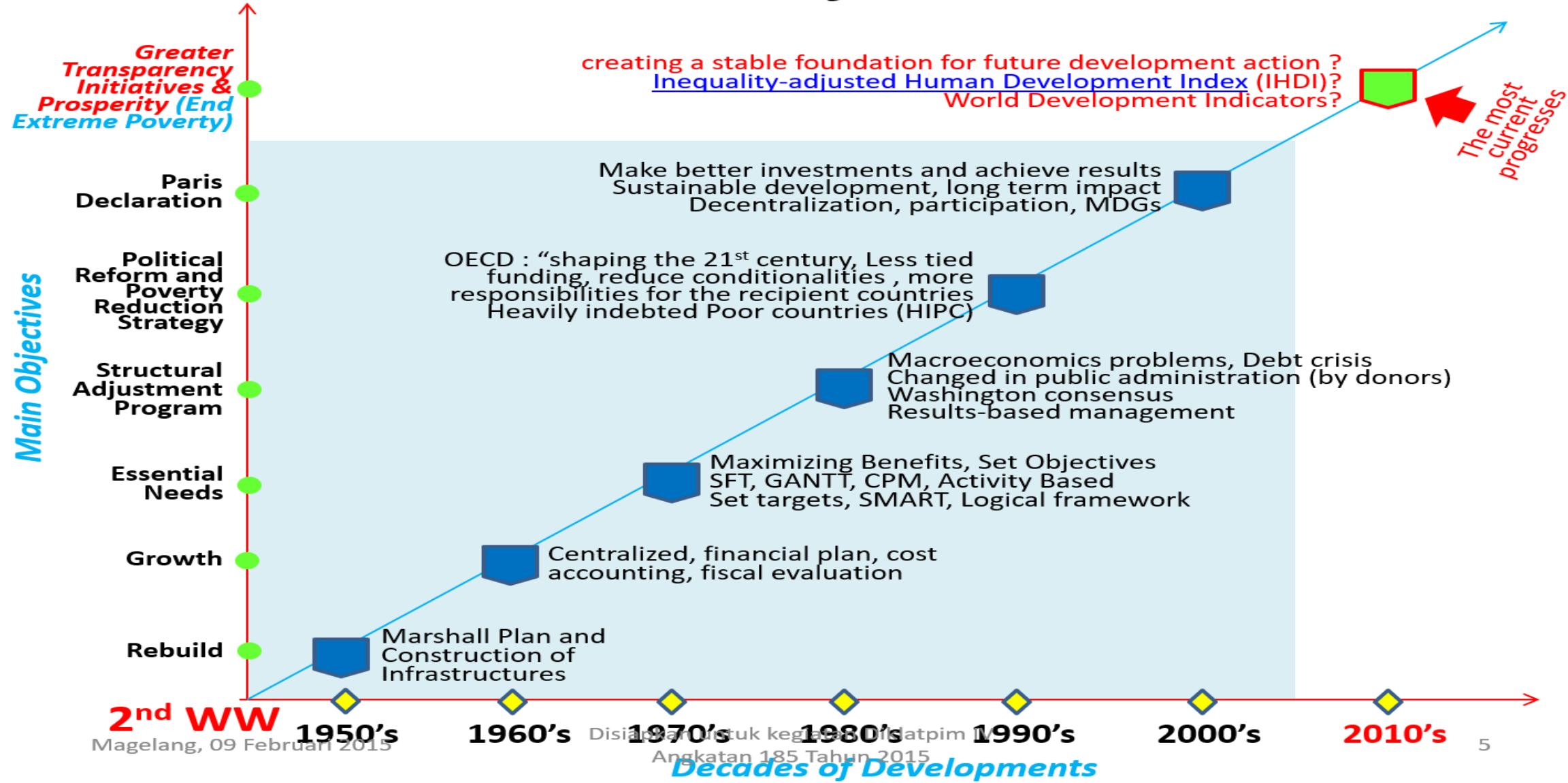


**Society 5.0 Society or the relevant approach, through advanced data utilization to connect diversified industries and cultures, to promote multi-sectoral innovations and to establish a symbiotic society of human and natural ecosystems which efficiency facilitates the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the United Nations (UN).**

# PROSES TRANSFORMASI GLOBAL UNTUK SUSTAINABLE DEVELOPMENT



## TIME LINE : *Global Transformation Milestones*





# KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI *KEY-DRIVER TRANSFORMASI*

# KEBIJAKAN FISKAL & PERTUMBUHAN EKONOMI

# APBN



Mempercepat Transformasi Ekonomi  
yang Inklusif dan Berkelanjutan

**Integrity**

**Teamwork**

**Responsive**

## Fokus Kebijakan Fiskal 2024



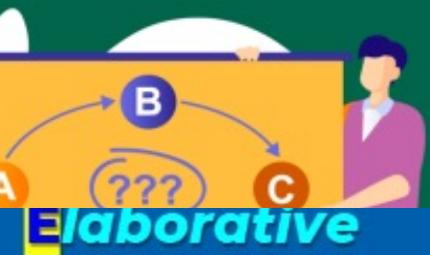
Melalui pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilisasi APBN yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi.



Melalui pengoptimalan fungsi alokasi APBN yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*).



Melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang.



**Elaborative**

**Smart**

**Service**

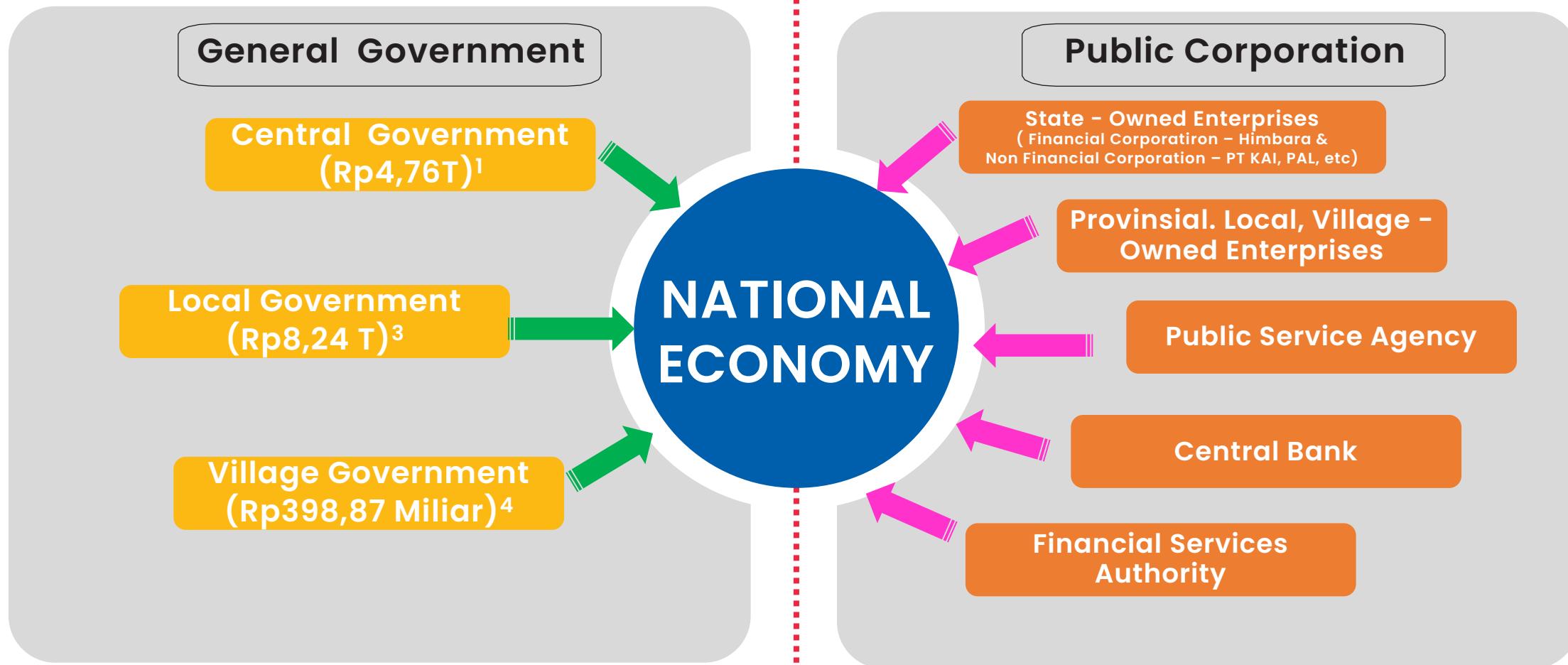
**HAnDAl**



# OTORITAS KEBIJAKAN FISKAL MELAKUKAN TRANSFORMASI MELALUI *PUBLIC SECTOR SEBAGAI AGENT OF CHANGE/ DEVELOPMENT*

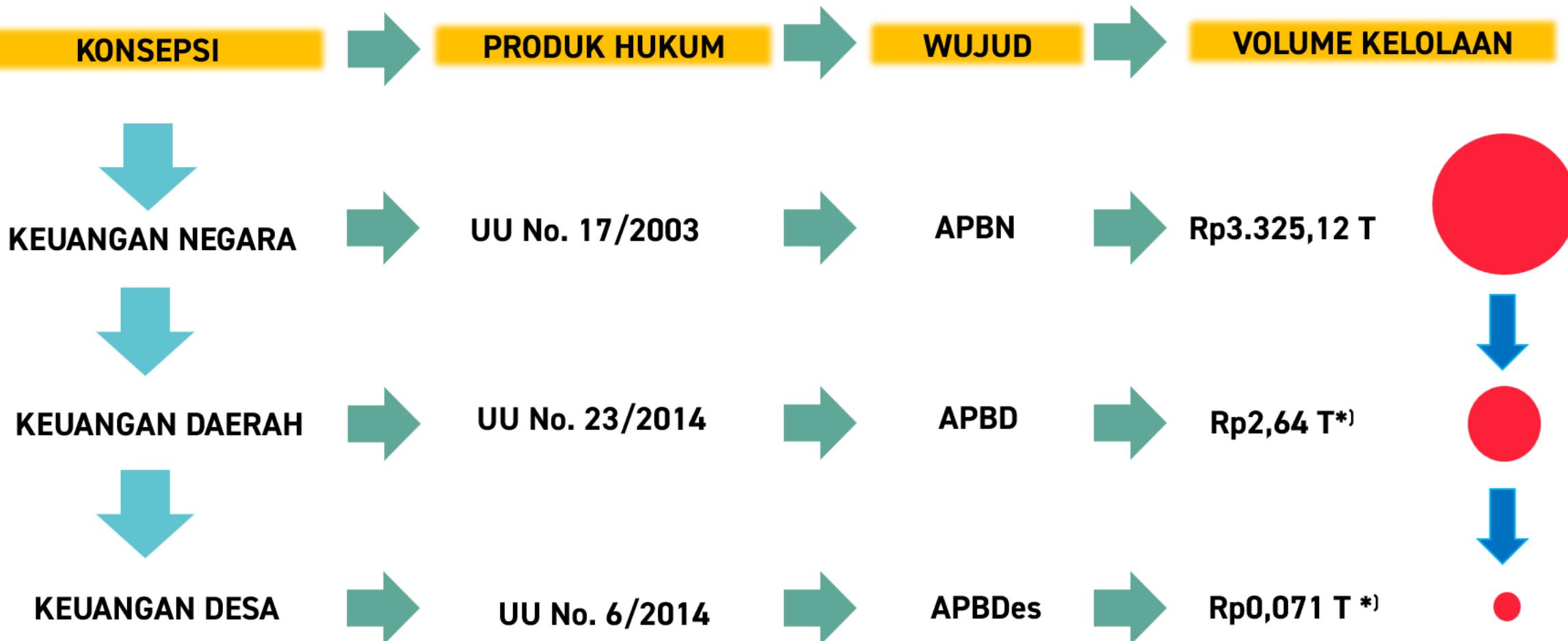
# PUBLIC SECTOR DALAM GOVERNMENT

## FINANCE STATISTICS (GFS)





# KONSEPSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK KONTEMPORER DI INDONESIA



Catatan :  
\*) Contoh besaran APBD dan APB-Des



# ALOKASI BELANJA NEGARA di SUMATERA TA 2024



<sup>1</sup> Angka bersifat perkiraan sementara yaitu setara proporsi alokasi Belanja APBN di Sumatera dari total alokasi Subsidi dan Bansos sebesar Rp443,4 T, masing-masing Subsidi sebesar Rp285,97 T (Subsidi Energi Rp189,1 T dan Subsidi Non Energi Rp96,9 T) dan Bansos sebesar Rp157,3 T.

<sup>2</sup> Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga dapat berubah sepanjang tahun anggaran 2024.

<sup>3</sup> Mulai TA 2024, penyaluran seluruh jenis TKD melalui KPPN setempat.



# Kinerja Pendapatan Negara dan Belanja K/L & TKD : Regional Sumatera

per tanggal 23 Agustus 2024



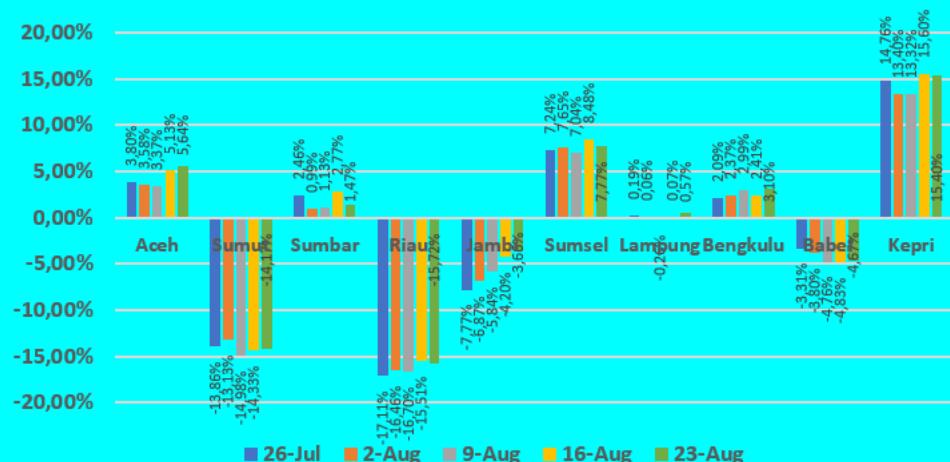
Berdasarkan konsolidasi kanwil DJPb s.d. 23 Agustus 2024, pendapatan negara regional Sumatera mencapai Rp75,15 triliun, menurun **4,29% (yoy)** dari bulan Agustus 2023 yang sebesar Rp78,52 triliun. Di sisi lain, belanja K/L dan TKD regional Sumatera telah terealisasi Rp203,68 triliun atau **59,58%** dari pagu Rp341,85 triliun. Realisasi tersebut meningkat **15,14% (yoy)** dari bulan Agustus 2023 yang sebesar Rp176,90 triliun.

Provinsi	Pendapatan Negara (triliun rupiah)						Growth (yoy)	Belanja K/L dan TKD (triliun rupiah)						
	Tahun 2023			Tahun 2024				Provinsi	Tahun 2023			Growth (yoy)		
	Target	Realisasi	%Real thd Target	Target	Realisasi	%Real thd Target			Pagu	Realisasi	%Real thd Pagu	Pagu	Realisasi	
Aceh	6,80	3,77	55,43%	7,01	3,98	56,76%	▲ 5,64%	Aceh	48,91	26,28	53,73%	49,98	31,55	63,13% ▲ 20,03%
Sumut	38,19	21,77	57,00%	44,94	18,69	41,58%	▼ 14,17%	Sumut	67,15	36,77	54,75%	70,55	41,46	58,77% ▲ 12,76%
Sumbar	7,86	4,84	61,60%	8,83	4,91	55,68%	▲ 1,47%	Sumbar	32,28	18,52	57,37%	33,93	20,66	60,87% ▲ 11,55%
Jambi	7,07	4,90	69,29%	8,58	4,72	54,94%	▼ 3,66%	Jambi	24,18	12,37	51,15%	24,13	14,37	59,54% ▲ 16,18%
Babel	3,38	1,95	57,78%	3,73	1,86	49,85%	▼ 4,67%	Babel	10,91	5,87	53,82%	10,27	6,26	60,92% ▲ 6,57%
Riau	27,84	15,21	54,63%	29,90	12,82	42,87%	▼ 15,72%	Riau	33,78	16,75	49,57%	32,73	19,27	58,88% ▲ 15,05%
Kepri	11,52	7,54	65,42%	14,15	8,70	61,45%	▲ 15,40%	Kepri	18,95	8,79	46,40%	17,92	9,69	54,08% ▲ 10,20%
Bengkulu	3,04	1,81	59,45%	3,30	1,86	56,32%	▲ 3,10%	Bengkulu	15,99	8,86	55,42%	16,49	9,89	59,96% ▲ 11,56%
Sumsel	19,91	10,87	54,60%	24,36	11,72	48,10%	▲ 7,77%	Sumsel	51,34	24,02	46,78%	53,06	29,65	55,88% ▲ 23,45%
Lampung	10,23	5,87	57,35%	11,21	5,90	52,64%	▲ 0,57%	Lampung	32,18	18,68	58,06%	32,80	20,90	63,72% ▲ 11,89%
<b>Total</b>	<b>135,84</b>	<b>78,52</b>	<b>57,81%</b>	<b>156,03</b>	<b>75,15</b>	<b>48,17%</b>	<b>▼ 4,29%</b>	<b>Total</b>	<b>335,67</b>	<b>176,90</b>	<b>52,70%</b>	<b>341,85</b>	<b>203,68</b>	<b>59,58%</b> ▲ 15,14%

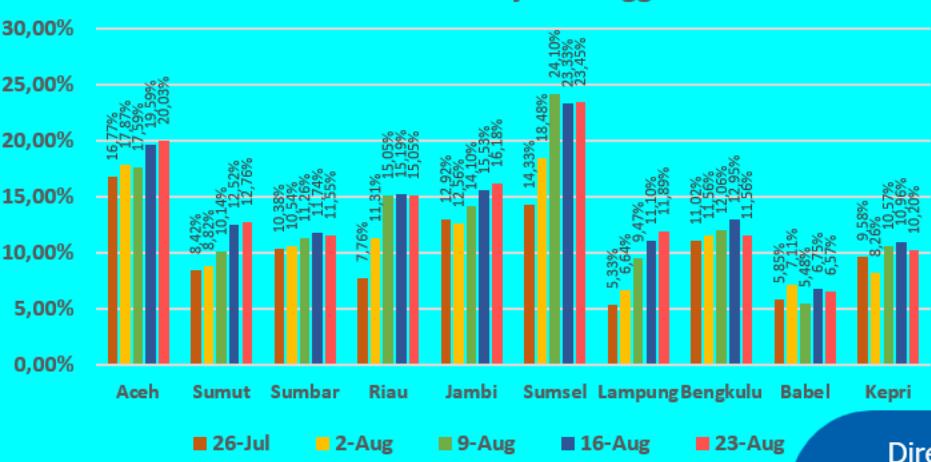
## Highlights

- Dari 10 K/L pagu tertinggi, **Kemenhan** merupakan yang **tertinggi**, yaitu 69,84%, dengan realisasi Rp7,96 triliun dari pagu Rp11,38 triliun.
- Sebaliknya, **Kemenhub** terendah yaitu 36,41% dari pagu Rp7,07 triliun.
- BKKBN** merupakan K/L dengan %realisasi **tertinggi** thd pagu, yaitu 70,82% dari pagu, bersama dengan Kemenhan yang di atas 68%.
- Sebaliknya, **Kemendag** menjadi satu-satunya K/L dg %realisasi di bawah 25% dan sekaligus **terendah** (23,63% dr pagu)
- KPPN Muara Bungo, Kotabumi** dan **Kutacane** adalah tiga KPPN dengan %realisasi tertinggi terhadap pagu.
- KPPN Batam** terendah, dengan %realisasi thdp pagu 49,32%.

Growth Pendapatan 5 Minggu Terakhir

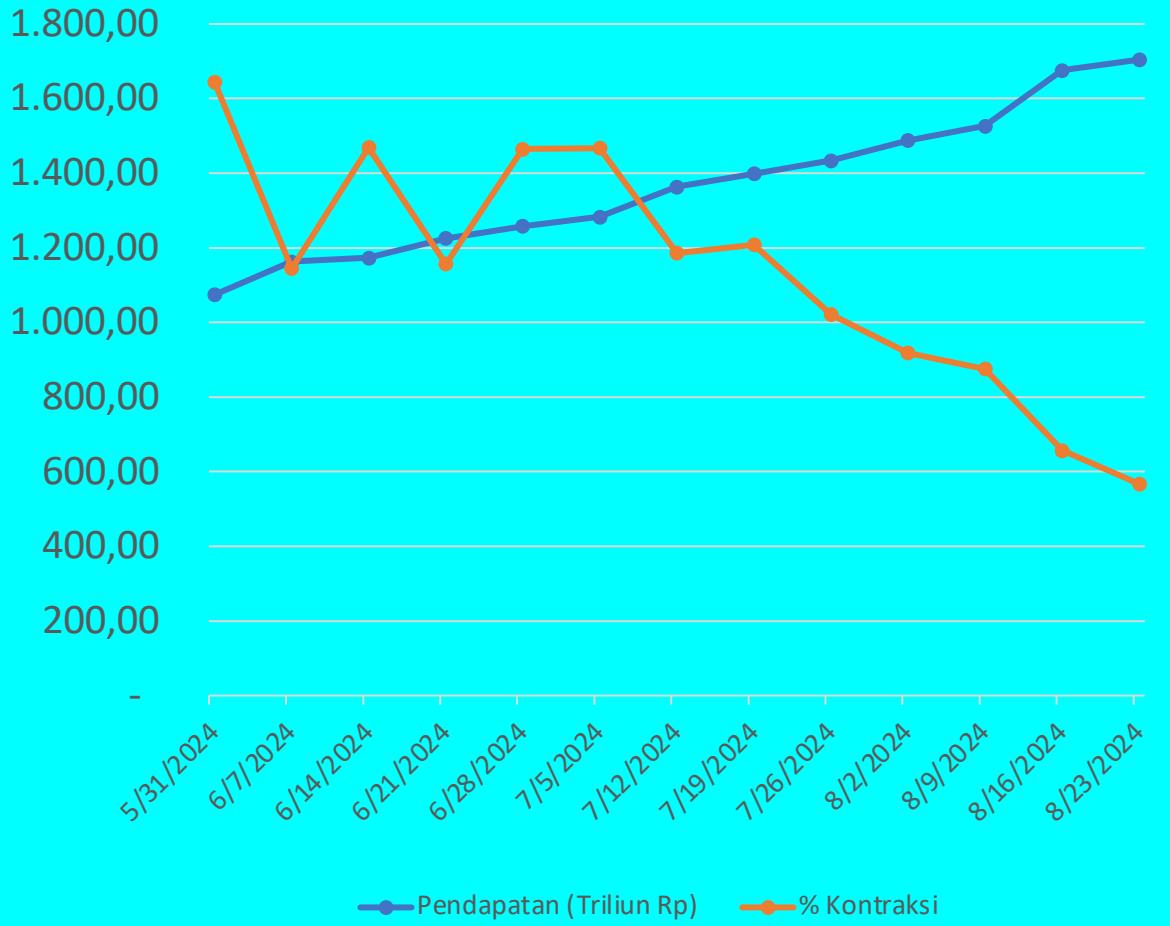


Growth Belanja 5 Minggu Terakhir



# KINERJA FISKAL PUSAT DAN DAERAH TERKENDALI

## Progress Moderasi Kontraksi Pendapatan Negara Dalam Semester II APBN Tahun 2024

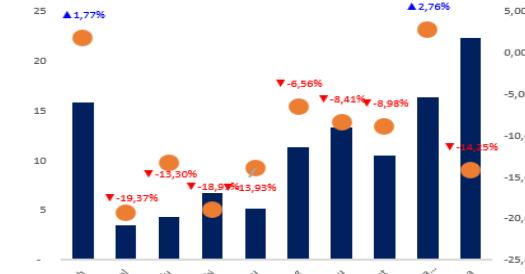


## Kinerja APBD Regional Sumatera kokoh dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja

Pendapatan Rp108,79 T (35,73%) ▼ 8,34%

### PENDAPATAN

- Menyumbang 22,43% terhadap realisasi nasional.
- Terkontraksi 8,34% (yoY). Pendapatan Daerah utamanya disumbang pendapatan transfer. Kontraksi pendapatan APBD terjadi di hampir seluruh wilayah Sumatera, kecuali Aceh dan Sumatera Selatan.
- Kinerja pendapatan tertinggi di Aceh (39,37%) dan terendah di Bengkulu (31,78%). Pertumbuhan tertinggi di Sumatera Selatan (▲ 2,76%) dan terendah di Babel (▼ 19,37%).

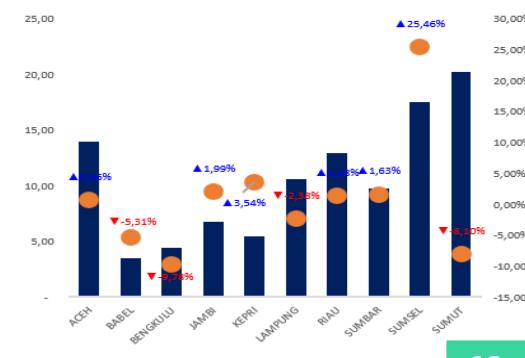


Belanja : Rp105,64 T (36,59%)

▲ 1,19%

### BELANJA

- Menyumbang 10,28% terhadap realisasi nasional.
- Pertumbuhan hampir seluruh wilayah Sumatera, kecuali Babel, Bengkulu, Lampung, dan Sumut. Pertumbuhan ditopang kenaikan belanja Pegawai. Belanja Pegawai terealisasi Rp53,17 T utamanya untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.
- Porsi realisasi Belanja Pegawai terhadap total Belanja APBD sebesar 50,34%, masih lebih tinggi dari porsi sesuai UU HKPD.
- Kinerja belanja tertinggi di Sumsel (38,55%) dan terendah di Jambi (32,29%). Pertumbuhan tertinggi di Sumsel (▲ 25,46%) dan terendah di Bengkulu (▼ 9,78%).

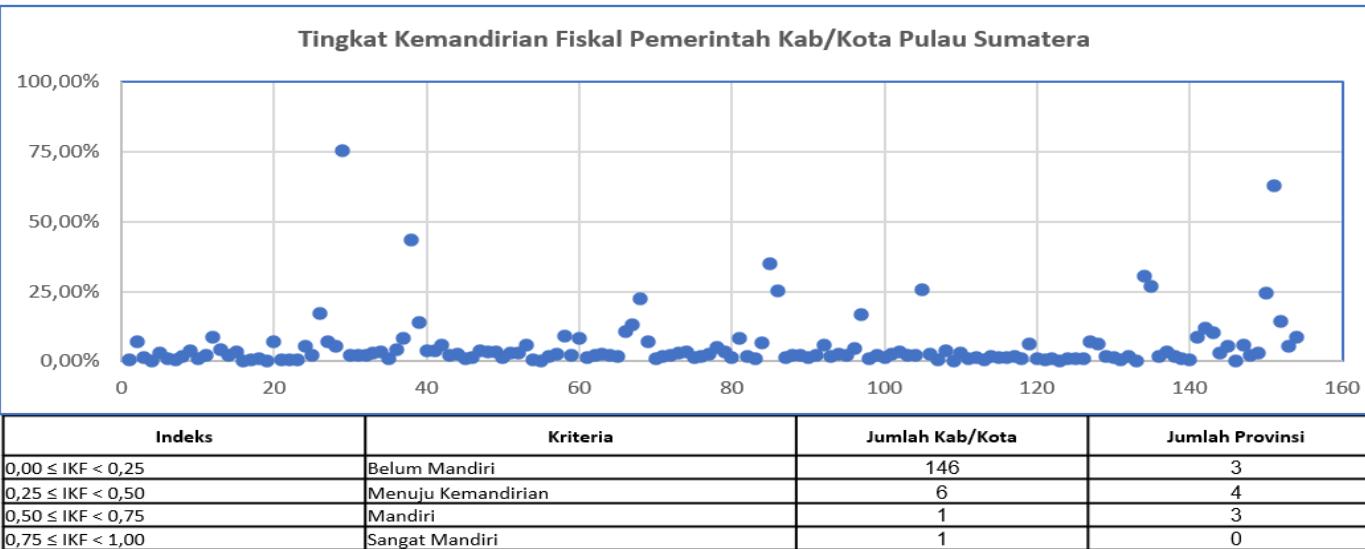
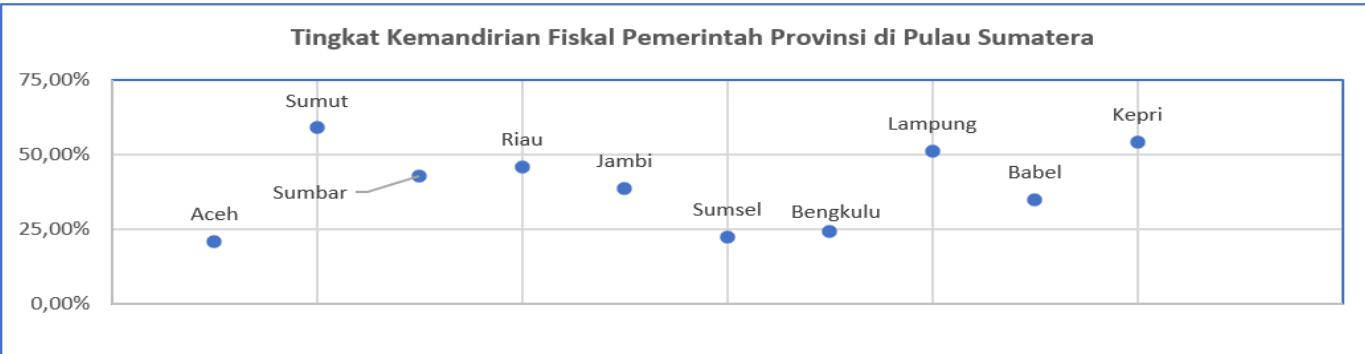


Sumber: ALCo Regional wilayah Sumatera, Juli 2024 (draf)



## Kondisi kemandirian fiskal Regional Sumatera beragam dan provinsi cenderung lebih mandiri

Kemandirian fiskal di Jawa berada pada rentang 2,62% hingga 67,89%, sedangkan di Sumatera berada pada rentang 0,19% hingga 75,25%. Kondisi menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Regional Sumatera sangat beragam.



### SUMATERA

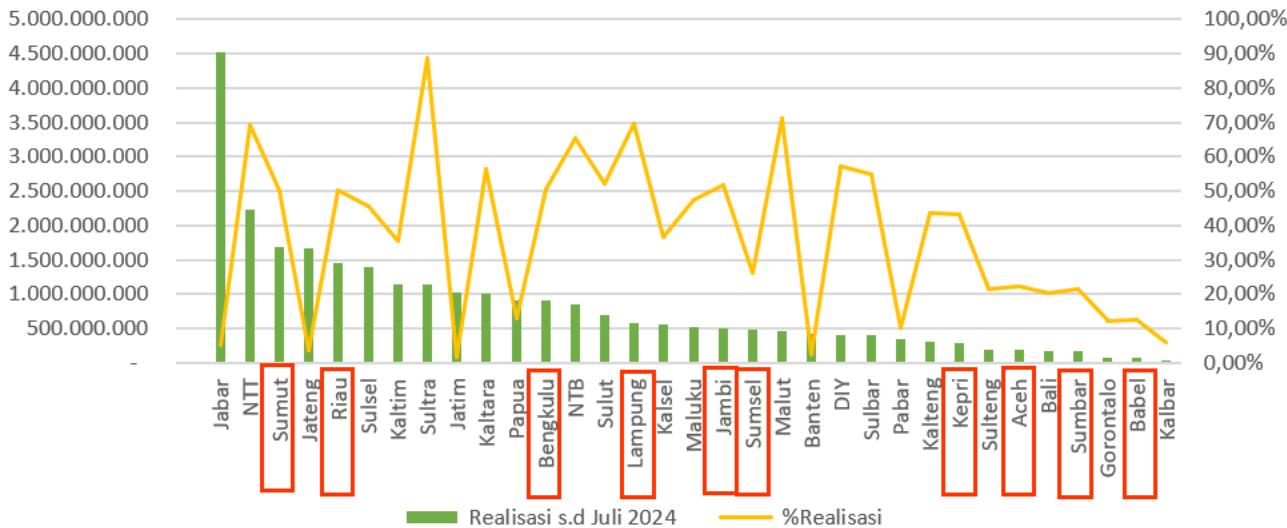
- ✓ Terdapat 3 provinsi yang memiliki kemandirian fiskal **Mandiri** ( $0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$ ), yaitu Sumatera Utara, Lampung, dan Kepulauan Riau.
- ✓ Untuk tingkat kab/kota ada 1 wilayah yang memiliki kemandirian fiskal **Sangat Mandiri** yaitu Kab. Langkat dan 1 kab/kota yang berada pada level **Mandiri** yaitu Kota Batam.
- ✓ Untuk provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang masih berada di bawah level Mandiri, diperlukan *policy response* terkait transfer ke daerah dan kebijakan terkait belanja daerah melalui Dekon TP.



# Analisis Tematik: Pengelolaan Terpadu UMKM



## Realisasi Belanja Pengelolaan Terpadu UMKM per Provinsi



Ket: Provinsi Jakarta dikeluarkan dari grafik karena angkanya outlier dari provinsi lainnya

## Analisis

- Berdasarkan realisasi belanja per provinsi s.d 31 Juli 2024, **Provinsi Jakarta secara nominal** merupakan provinsi dengan **realisasi tertinggi** sebesar Rp426,66 miliar atau (49,76% dari pagu Rp857,42 miliar) yang didominasi oleh kegiatan pelayanan registrasi dan sertifikasi halal. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar Rp4,51 miliar (5,02% dari pagu Rp89,99 miliar) yang didominasi oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM. Di sisi lain, **Provinsi Kalimantan Barat secara nominal** merupakan provinsi dengan **realisasi terendah** sebesar Rp42,06 juta (5,94% dari pagu Rp708,14 juta) dikarenakan masih rendahnya kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah.
- Berdasarkan laporan Kanwil DJPb, terdapat 622 UMKM binaan KPPN di lingkup kerja Kanwil DJPb. UMKM tersebut terdiri dari beragam jenis usaha meliputi usaha kuliner, industri pengolahan, *fashion*, *kriya*, *retail*, jasa, agrobisnis, garmen, manufaktur.

## UMKM Binaan KPPN Lingkup Kanwil DJPb

No	Jenis UMKM	Jumlah UMKM Binaan KPPN
1	Kuliner	412
2	Industri Pengolahan	97
3	Fashion	36
4	Kriya	32
5	Retail	17
<b>TOTAL</b>		<b>594</b>

Sumber : Laporan Kanwil DJPb

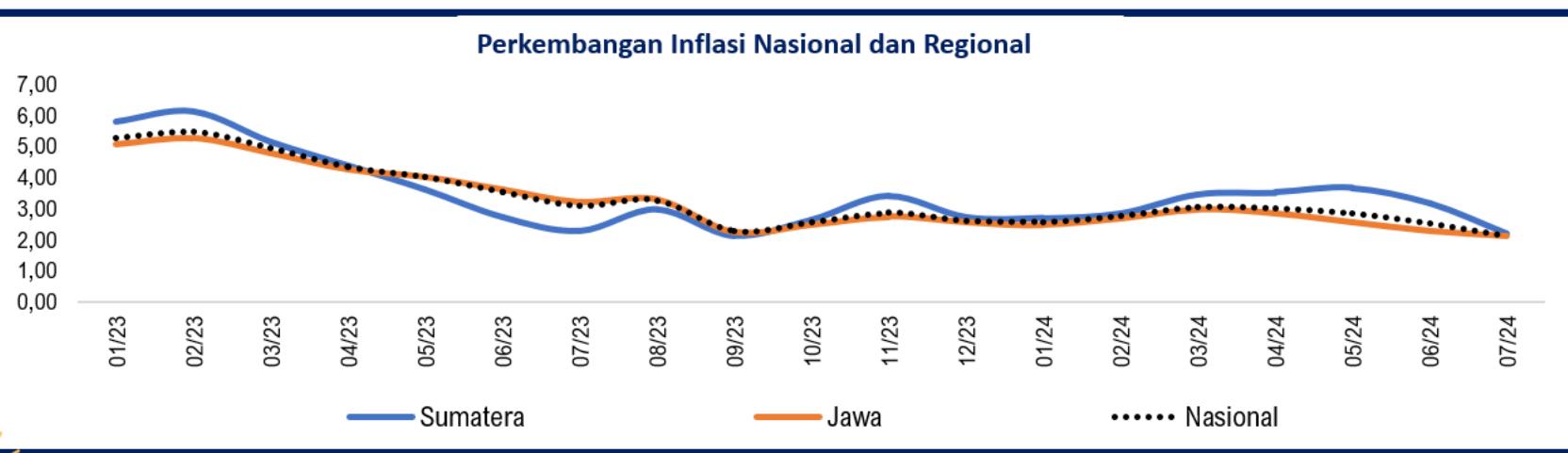
No	Jenis UMKM	Jumlah UMKM Binaan KPPN
6	Jasa	10
7	Agrobisnis	7
8	Garmen	6
9	Manufaktur	2
10	Lainnya	3
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>622</b>

## Isu dan Permasalahan

- UMKM tidak terdata seluruhnya dan pemetaannya kurang jelas sehingga banyak UMKM tidak mendapat pembinaan yang optimal dan sulit untuk mempromosikan produk UMKM.
- UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan (KUR/UMi) dari lembaga keuangan penyulur.

# Tingkat inflasi di Jawa dan Sumatera masih tetap terjaga (masih di rentang $2,5 \pm 1\%$ ) dengan tren menurun

“Distribusi dan kerja sama antardaerah perlu terus diperkuat untuk mengurangi **disparitas inflasi**.”



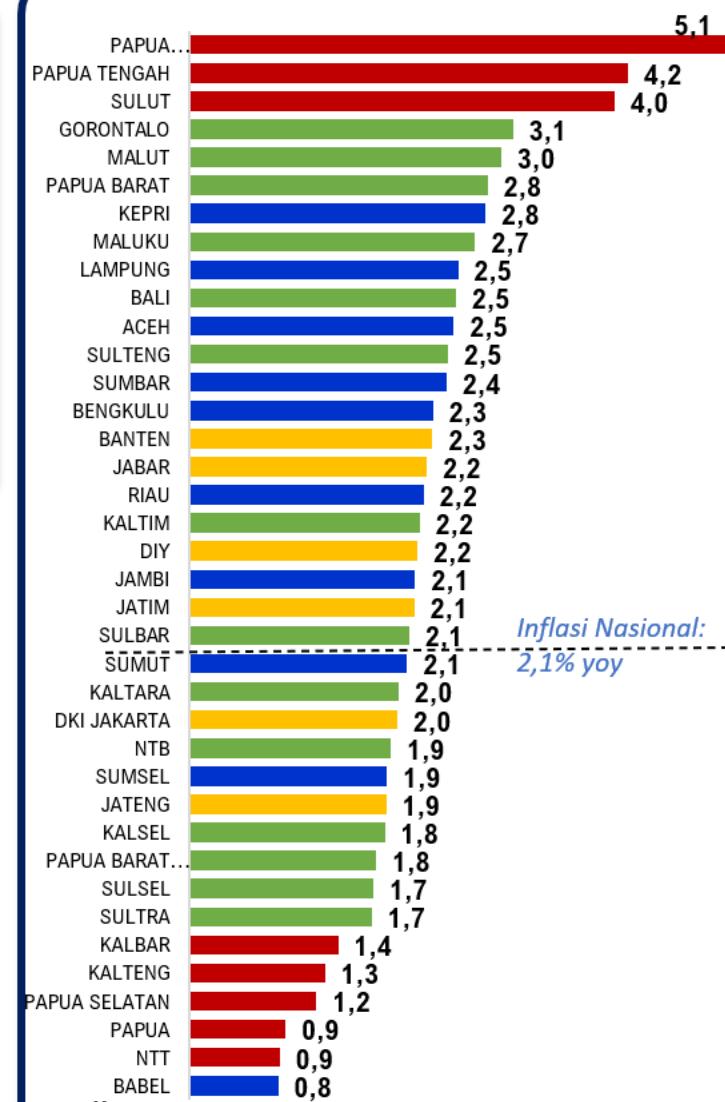
### Insight:

- Inflasi nasional Juli 2024 sebesar 2,1% (yoy).
- Pergerakan inflasi **Jawa** dan **Sumatera** sangat memengaruhi pergerakan inflasi nasional, masing-masing berkontribusi 63,3% dan 18,1% dengan total kontribusi 81,4%.
- Analisis inflasi tertinggi di Jawa dan Sumatera:
  - Berdasarkan provinsi: Jakarta (20,47% yoy), Jawa Barat (18,99% yoy), dan Jawa Timur (11,71%).
  - Berdasarkan kelompok pengeluaran: makanan, minuman, dan tembakau khususnya komoditas beras dan cabe rawit (12 dari 16 provinsi).
- Di Jawa inflasi tertinggi terjadi di Banten (2,3%), dan terendah di Jakarta (2,0% yoy), sedangkan di Sumatera inflasi tertinggi di Kepri (2,8% yoy) dan terendah di Babel (0,8% yoy).

### Policy Measure

- Dukungan Fiskal untuk pengendalian inflasi
- Sinergi Pemda, Kanwil, dan berbagai stakeholder melalui TPID untuk pengendalian inflasi

### Inflasi Juli'24



Inflasi Nasional:  
2,1% yoy

Ket  
■ dalam rentang sasaran  $2,5 \pm 1\%$  ■ Provinsi di Sumatera

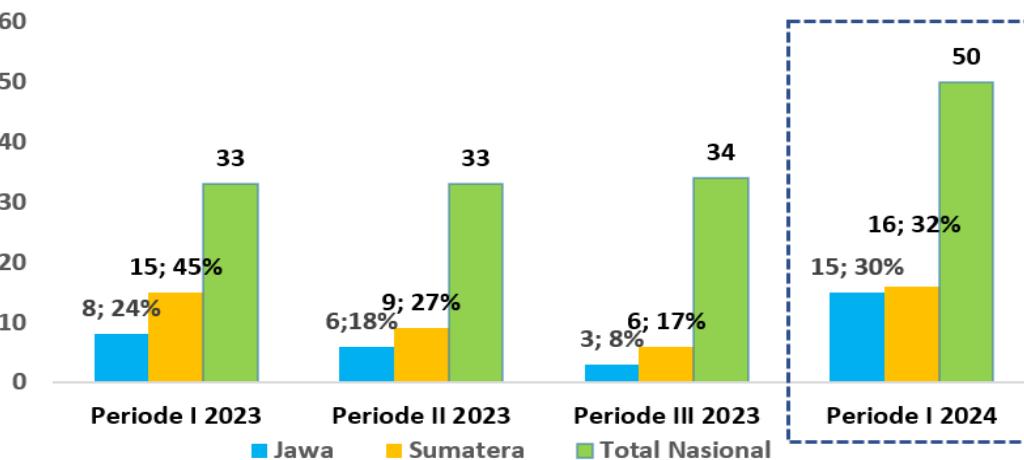
## Kinerja pengendalian inflasi di Sumatera didukung strategi yang efektif



### Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi

- Tren penerima insentif fiskal pengendalian inflasi menunjukkan peningkatan di tahun 2024, dipengaruhi oleh tingginya awareness daerah, terutama komitmen kepala daerah terkait pengendalian inflasi.
- Pengendalian Inflasi di **Sumatera relatif berhasil** tercermin dari tingginya jumlah pemda penerima insentif fiskal pada setiap periode selama tahun 2023 dan 2024.

#### Jumlah Pemda Penerima Insentif Fiskal



Notes: Total Pemda Sumatera =164 dan Jawa 119

### Strategi Pengendalian Inflasi

#### Intervensi Keterjangkauan Harga (K1)

- Subsidi pangan
- Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar
- Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

#### Intervensi Ketersediaan Pasokan (K2)

- Kerja sama antar daerah dan contract farming dengan daerah produsen/ pemasok pangan
- Pemantauan stok

#### Intervensi Kelancaran Distribusi (K3)

- Pembangunan gerai/kios/grosir/Mini DC
- Pembentukan ekosistem/ distribusi komoditas utama
- Penjualan online/ digital pangan berkolaborasi dengan marketplace
- Transformasi Metode Penjualan BUMD
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kolaborasi OPD dengan UMKM dalam distribusi Komoditas Utama

#### Intervensi Komunikasi Efektif (K4)

- Edukasi masyarakat agar tidak *panic buying*, minimalisir *food waste*, dan belanja bijak
- Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra provinsi melalui Rakorwil TPID, HLM TPID, Rakorpusda, Rakorwil, Rapat Koordinasi dengan Kementerian, Bulog, dan instansi terkait lainnya

# KINERJA EKONOMI INDONESIA SEMESTER II TAHUN 2024



Gambar 5 Distribusi Spasial PDRB, 2023



# SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAN DAERAH (KEM PPKF – KUA PPAS)

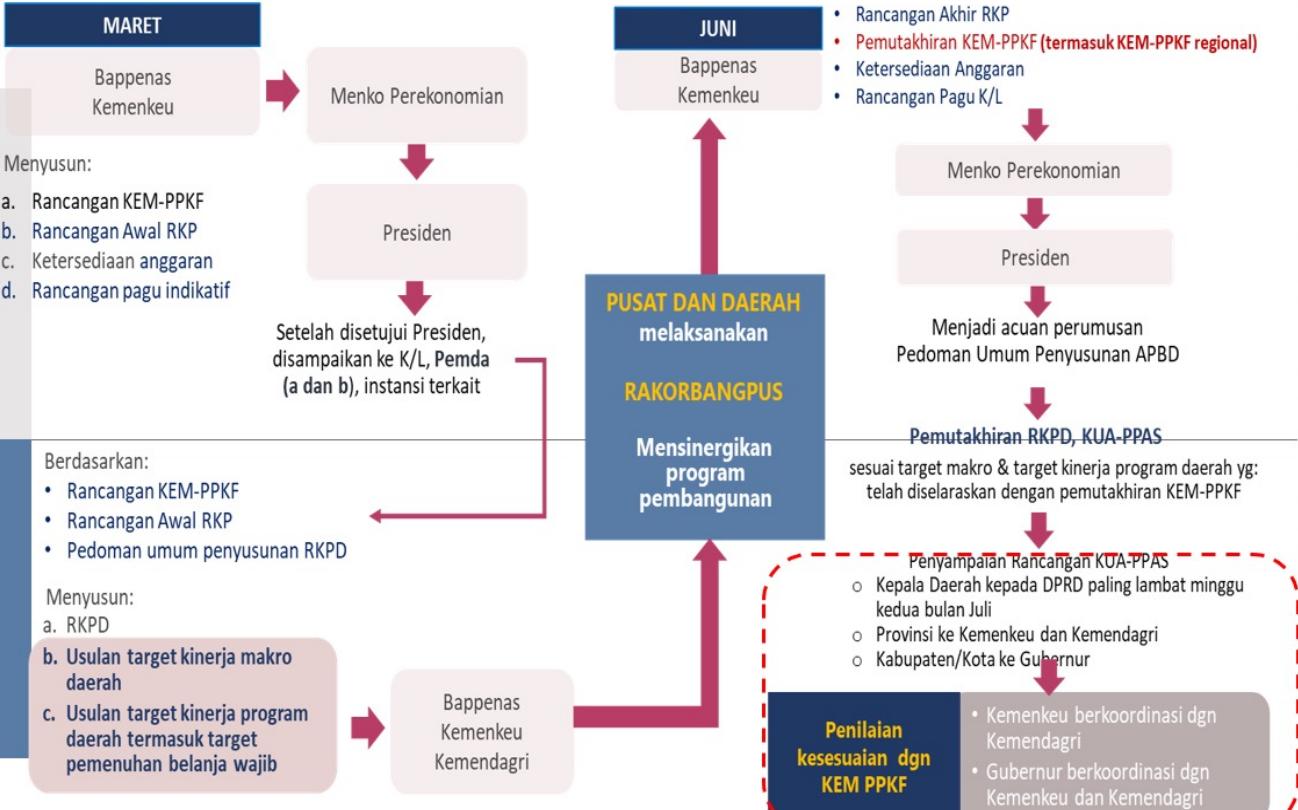




# Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

## Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah (Tahap Perencanaan & Penganggaran)

Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah merupakan salah satu **strategi penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional** untuk **penguatan fungsi distribusi** agar kebijakan fiskal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien



### PP No. 1 Tahun 2024

#### tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional





## Reviu keselarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS Sumatera Tahun 2024

**Belum terdapat keselarasan antara target pertumbuhan ekonomi, penentuan sektor dominan/unggulan antara KEM PPKF dengan KUA PPAS**

### KONDISI EXISTING

- Asumsi pertumbuhan ekonomi pada KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional berbeda sekitar 1% - 27% pada 7 Provinsi
- Asumsi sektor unggulan provinsi yang menyampaikan data, seluruhnya KUA/PPAS sesuai KEM PPKF Regional
- Dari Total 153 Pemda pada Regional Sumatera, masih terdapat 63 pemda yang belum lengkap menyampaikan informasi terkait KUA-PPAS s.d batas periode penyampaian laporan koordinasi Kanwil.

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Selisih (B-A)/A)
	KUA/PPAS (A)	KEM PPKF Reg (B)	
SUMATERA SELATAN	4,45%	5,40%	21,44%
SUMATERA BARAT	5,24%	5,20%	0,7%
ACEH	3,90%	4,15%	6,41%
SUMATERA UTARA	4,95%	5,35%	8,01%
KEPULAUAN RIAU	6,90%	5,10%	26,09%
RIAU	4,00%	3,35%	16,18%
JAMBI	5,25%	4,80%	8,60%

### REKOMENDASI

- Perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM Kanwil DJPb terkait KEM PPKF dan KUA PPAS.
- Perlu landasan hukum dan petunjuk teknis yang komprehensif.
- Perlu adanya keterlibatan Kanwil DJPb dalam pembahasan KEM PPKF regional.
- Perlu penguatan peran DJPb sebagai *financial adviser* pada Pemda.





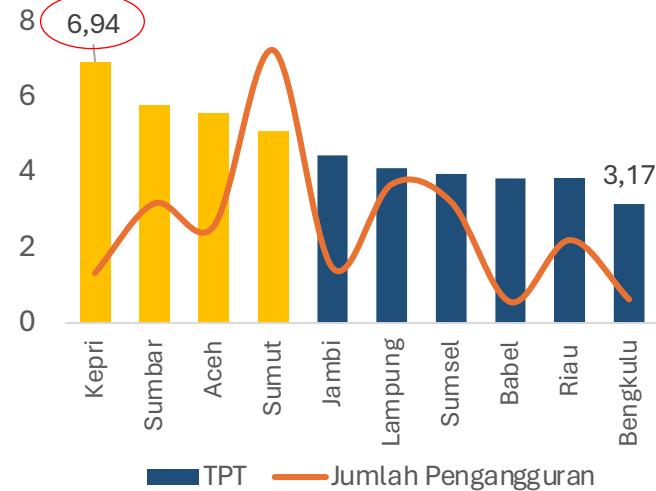
# *Quo vadis* TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI REGIONAL SUMATERA



# Inklusivitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat

## Ketenagakerjaan Sumatera

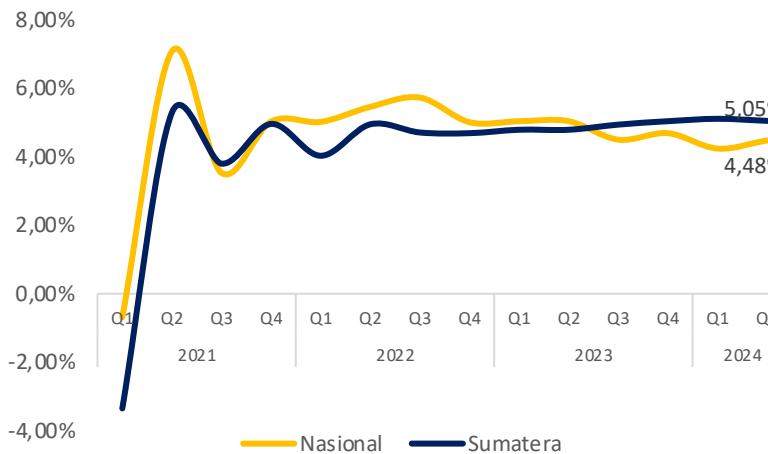
Sumber: BPS RI



- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **tertinggi di Kepri 6,94%** dan **terrendah di Bengkulu 3,17%**.
- Dibandingkan TPT nasional (4,82%), **terdapat 4 provinsi di atas nasional** yaitu Kepri, Sumbar, Aceh, dan Sumut disebabkan a.l. kualitas SDM, tingginya pekerja sektor informal, dan relokasi industri.

## Pertumbuhan Ekonomi (yoY)

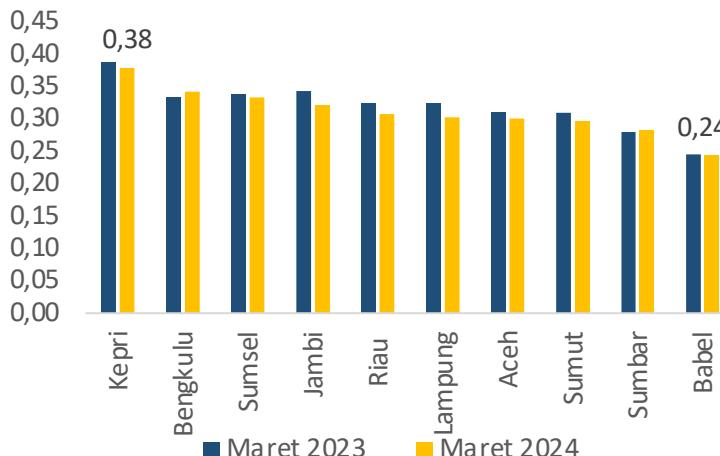
Sumber: BPS RI



- Perkembangan ekonomi Sumatera cenderung stagnan dari tahun 2022 hingga triwulan II 2024.
- Dari **tahun 2022, kondisi perekonomian regional Sumatera kembali normal** sebagai hasil dari stimulus pemerintah yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

## Perkembangan Gini Ratio

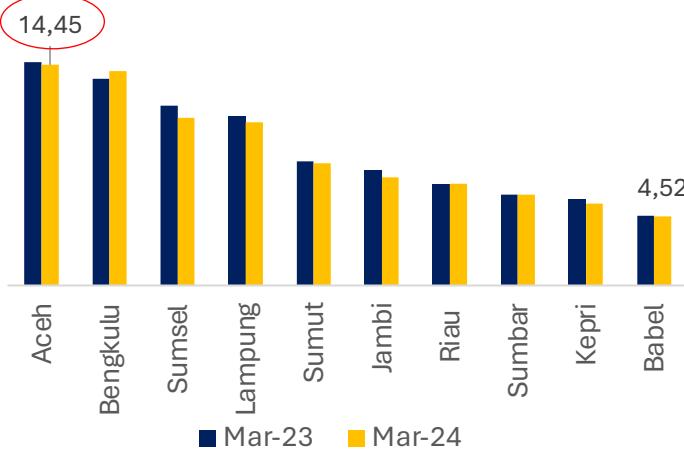
Sumber: BPS RI



- Gini Rasio **tertinggi berada di Kepri** sebesar 0,38. Hal ini disebabkan pengeluaran kelompok penduduk rata-rata di atas 40%.
- Gini Rasio **terendah berada di Babel** sebesar 0,24.
- Dibandingkan Gini Ratio nasional 0,397, **seluruh provinsi berada di bawah angka nasional**.

## Tingkat Kemiskinan Sumatera

Sumber: BPS RI



- Tingkat Kemiskinan di Sumatera bulan Maret 2024 **tertinggi terjadi pada Aceh** sebesar 14,45% dan **terendah di Babel** 4,52%.
- Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,03%, **terdapat 4 provinsi yang di atas nasional** yaitu Aceh, Bengkulu, Sumsel dan Lampung.

# Perekonomian Sumatera mendominasi 22,08% perekonomian nasional sehingga perlu upaya akselerasi

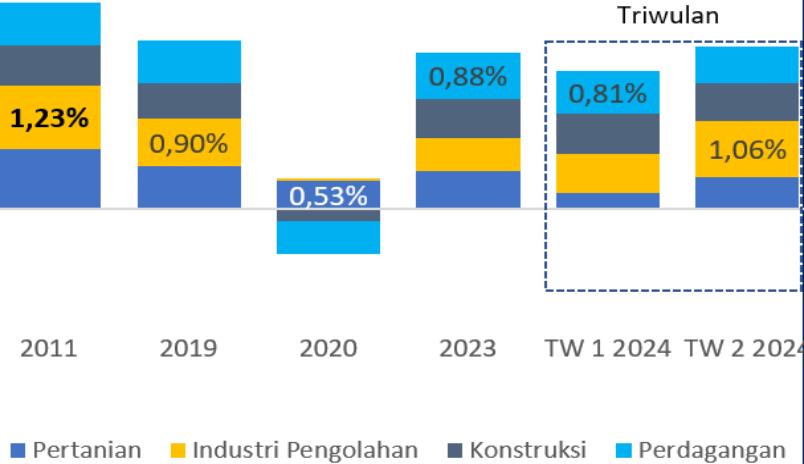
## Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Q2 2024

4,48% (yoY)

Nas 5,05% (yoY) Q2 (2024)

### Pertumbuhan Persektor

sumber pertumbuhan utama (%)



### Sumber pertumbuhan utama (lapangan usaha):

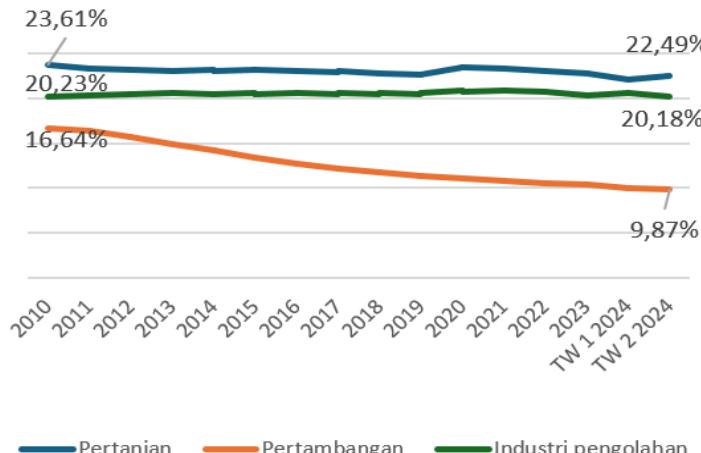
2023:

- Perdagangan
- Pertanian
- Industri Pengolahan

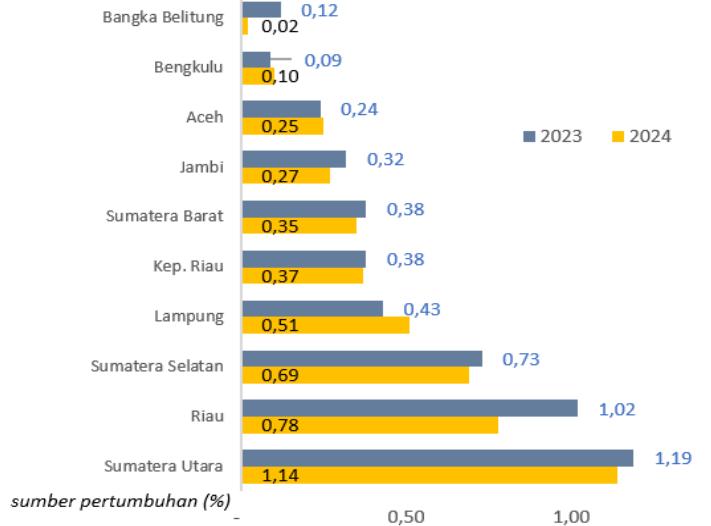
2024:

- Perdagangan
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Konstruksi

### Tren Kontributor Terbesar



### Perbandingan Provinsi



## HIGHLIGHT TRIWULAN II 2024

1

Perekonomian Sumatera mendominasi sebesar 57,04% dari total perekonomian nasional, dengan tren pertumbuhan positif periode 2011 – 2024.

2

Sumber pertumbuhan ekonomi utama di Sumatera cenderung fluktuatif antara sektor pertanian dan industri pengolahan sebelum pandemi dan sektor perdagangan besar dan industri pengolahan setelah pandemi.

## FORWARD LOOKING

1

Perlu kebijakan pengembangan Industri Pengolahan dari hulu ke hilir untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi akibat kondisi dan karakteristik Industri Pengolahan.

2

Perlu strategi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk memitigasi pertumbuhan ekonomi di Sumatera yang berada di bawah nasional pada beberapa periode terakhir.

UNIT KERJA TENAGA PENGKAJI BIDANG PERBENDAHARAAN | 2024

Integrity

Teamwork

Responsive

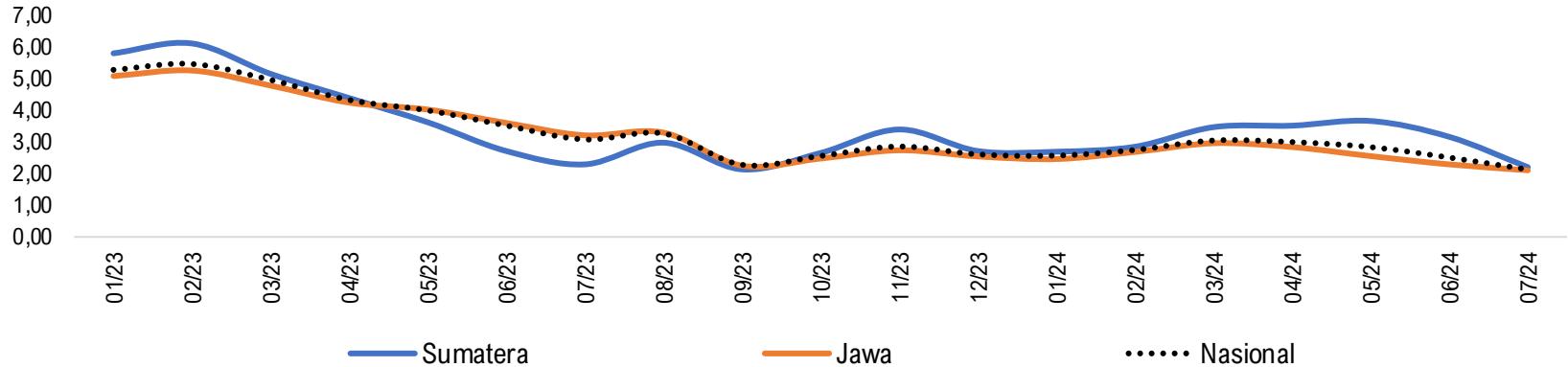
Elaborative

Smart

Service

HAnDAL

### Perkembangan Inflasi Nasional dan Regional



### Insight:

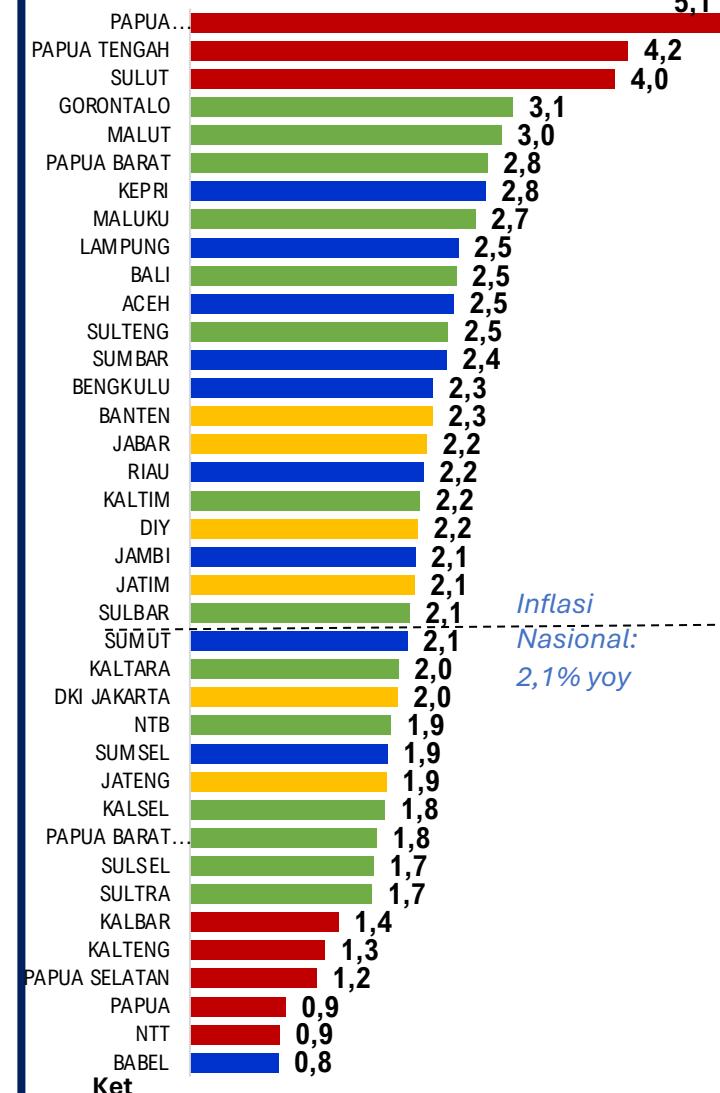
- Inflasi nasional Juli 2024 sebesar 2,1% (yoY).
- Pergerakan inflasi **Jawa dan Sumatera** sangat memengaruhi pergerakan inflasi nasional, masing-masing berkontribusi 63,3% dan 18,1% dengan total kontribusi 81,4%.
- Andil inflasi tertinggi di Jawa dan Sumatera:
  - Berdasarkan provinsi: Jakarta (20,47% yoY), Jawa Barat (18,99% yoY), dan Jawa Timur (11,71%).
  - Berdasarkan kelompok pengeluaran: makanan, minuman, dan tembakau khususnya komoditas beras dan cabe rawit (12 dari 16 provinsi).
- Di Jawa inflasi tertinggi terjadi di Banten (2,3%), dan terendah di Jakarta (2,0% yoY), sedangkan di Sumatera inflasi tertinggi di Kepri (2,8% yoY) dan terendah di Babel (0,8% yoY).



### Policy Measure

- Dukungan Fiskal untuk pengendalian inflasi
- Sinergi Pemda, Kanwil, dan berbagai stakeholder melalui TPID untuk pengendalian inflasi

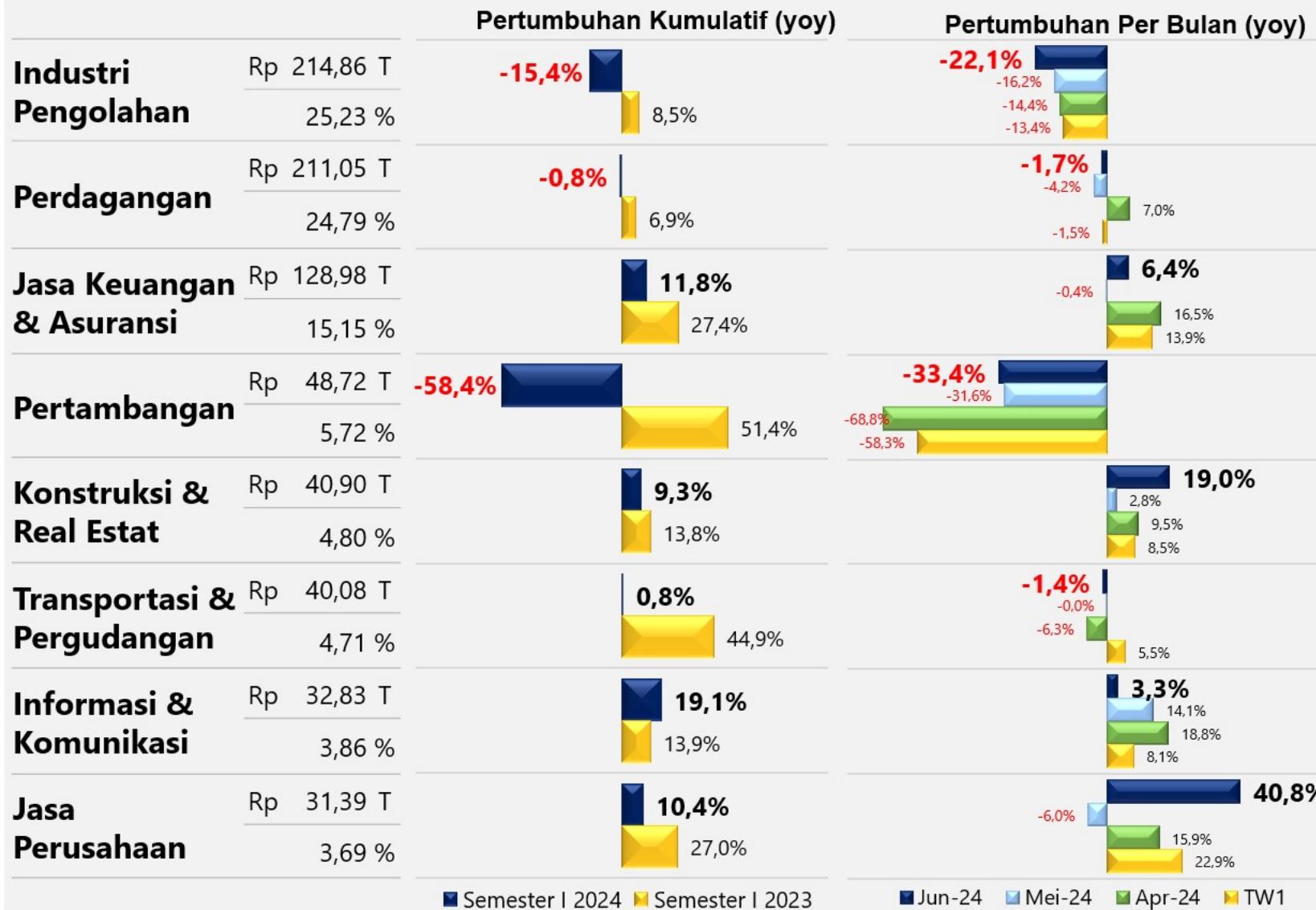
### Inflasi Juli'24





# PERTUMBUHAN PENERIMAAN NETO KUMULATIF SEKTOR UTAMA

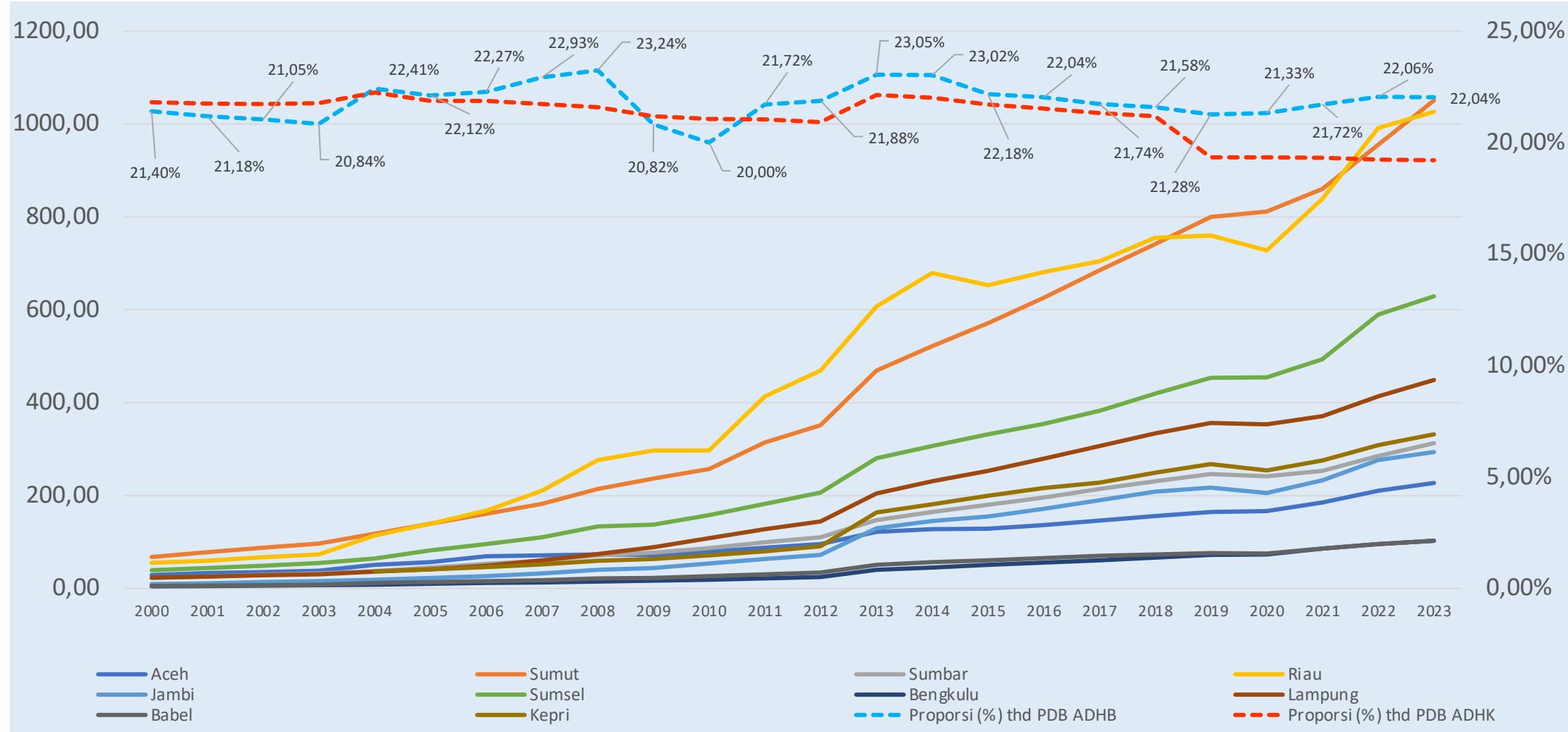
Sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan terkontraksi.



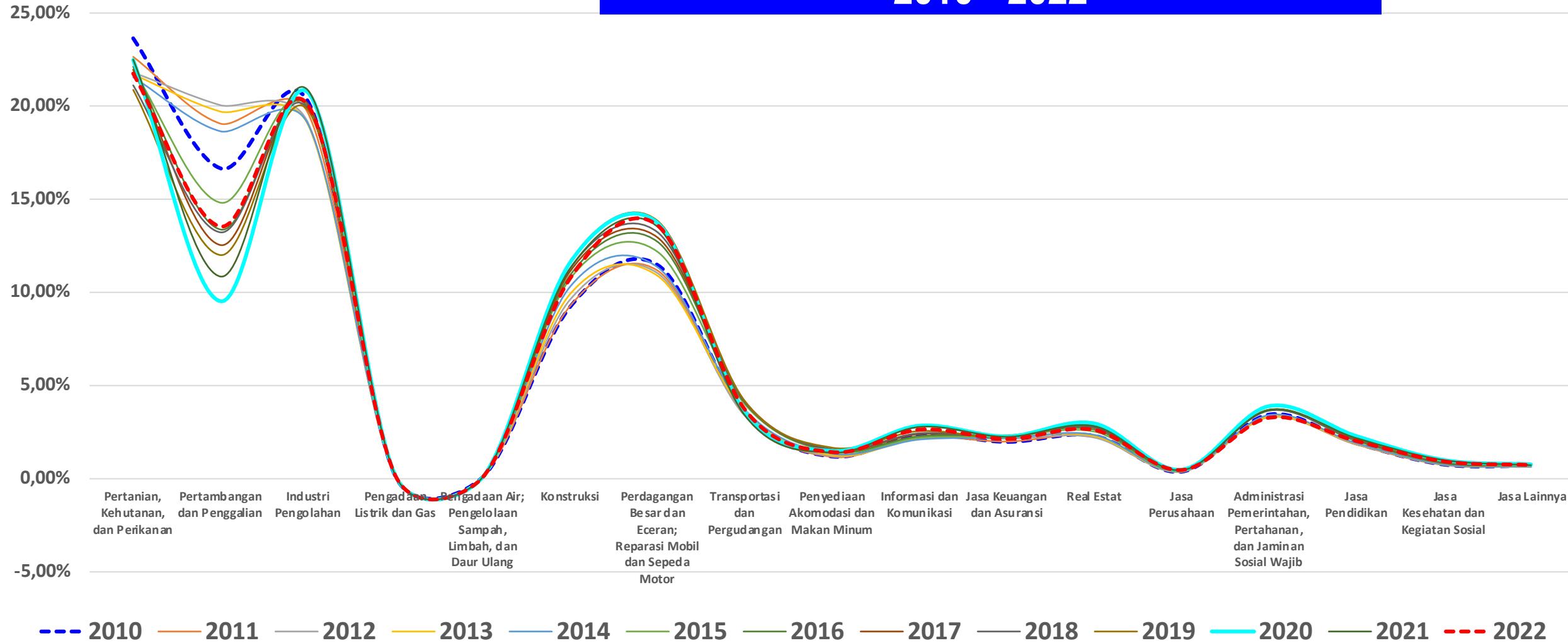
Mayoritas sektor utama tumbuh positif, sejalan dengan terjaganya keadaan ekonomi Indonesia. Namun demikian, perusahaan yang terdampak penurunan harga komoditas mengalami penurunan pembayaran pajak.

- Penurunan **Industri Pengolahan** dipengaruhi oleh peningkatan restitusi dan penurunan PPh Badan Tahunan terutama pada subsektor terkait komoditas (mis: Sawit, Logam, Pupuk).
- Penurunan **Pertambangan** disebabkan penurunan PPh Badan tahunan dan angsuran akibat penurunan harga komoditas tahun 2023 dan perubahan status izin usaha WP Batubara, serta peningkatan restitusi.
- Pertumbuhan Bruto sektor **Perdagangan** cukup baik didukung kuatnya konsumsi dalam negeri, meskipun secara neto terkontraksi karena restitusi.
- Sementara itu, **Jasa Keuangan & Asuransi, Konstruksi & Real Estat, serta sektor jasa lainnya** tumbuh positif sejalan dengan aktifitas yang meningkat.

# TREND PERTUMBUHAN AGREGAT PDRB ADHB 10 PROVINSI DAN PROPORSI PDRB REGIONAL SUMATERA TERHADAP NASIONAL TAHUN 2000-2023



# TRANSFORMASI PROPORSI PDRB ADHB per Lapangan Usaha Regional Sumatera Tahun 2010 - 2022





# TERIMA KASIH

